

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak lahirnya People Republic of China (PRC), atau yang kini dikenal luas sebagai Tiongkok, Taiwan diklaim sebagai salah satu provinsi Tiongkok sehingga Taiwan tak dapat mewakili dirinya sendiri dalam sistem internasional, termasuk di WHO. Klaim tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya Resolusi PBB no. 2578 tahun 1971 yang berisikan bahwa PRC merupakan satu-satunya perwakilan sah Tiongkok di seluruh badan PBB. Sejalan dengan resolusi tersebut, Resolusi 25.1 WHA menolak status hukum Taiwan sebagai sebuah negara, membuat sangat kecil kemungkinan bagi Taiwan untuk dapat menjadi negara anggota WHO. Sehingga menjadi pengamat adalah jalur alternatif bagi Taiwan untuk berpartisipasi di dalam kegiatan Organisasi Kesehatan Dunia ini.

Konstitusi WHO memang tidak menyuratkan mengenai keanggotaan pengamat. Akan tetapi tercantum bahwa suatu entitas internasional dapat mengikuti jalannya rapat tahunan World Health Assembly (WHA), badan pengambil keputusan tertinggi di WHO, melalui undangan dari Direktur Jenderal WHO. Akses ke WHA bagi Taiwan berarti kesempatan untuk bertukar pikiran tentang kesehatan masyarakat di platform internasional. Di sisi lain juga akan berfungsi untuk meningkatkan ruang internasional Taiwan, yang dapat membantu mengkonsolidasikan dukungan global menuju kemerdekaan Taiwan.

Sejak tahun 1997, di masa pemerintahan Lee Teng Hui, kebijakan luar negeri Taiwan memprioritaskan partisipasi di WHA dalam agenda pencarian ruang

internasional bagi Taiwan.¹ Baru pada tahun 2009, saat masa pemerintahan Ma Ying Jeou, Taiwan akhirnya memperoleh kesempatan untuk menghadiri WHA dengan nama “Chinese Taipei”. Kesempatan ini dapat dikatakan sebagai kemenangan bagi Taiwan yang telah 12 tahun berjuang.

Namun, keikutsertaan Taiwan dalam WHA harus terhenti di tahun 2017, karena presiden terpilih Taiwan dianggap tidak mematuhi konsensus 1992 mengenai *One China Principle*.² Hal ini secara implisit disampaikan oleh Tsai Ing Wen dalam wawancara dengan *Washington Post*. Presiden Taiwan tersebut menyatakan bahwa tidak mungkin pemerintahannya akan menerima kondisi yang bertentangan dengan keinginan publik, yang menyiratkan penolakannya terhadap konsensus 1992.³ Tiongkok bersikeras bahwa untuk mengikuti rapat tahunan WHA, Taiwan harus mematuhi Konsensus 1992. Meski proposal partisipasinya ditolak, pemerintah Taiwan menyatakan akan terus berupaya untuk mengikuti kembali rapat umum tahunan WHO tersebut dengan mendasarkan argumen pada prinsip-prinsip universalitas dalam sistem WHO dan ancaman yang diterima Taiwan akibat tidak tergabung ke dalam WHO.⁴

Hingga di awal tahun 2020, pandemi Covid-19 melanda. Ironisnya, di saat pandemi pun permasalahan hubungan lintas selat (*cross strait relations*) antara

¹ Sigrid Winkler, “Taiwan’s UN Dilemma: To Be or Not To Be,” *Brookings*. June 20, 2012, <https://www.brookings.edu/opinions/taiwans-un-dilemma-to-be-or-not-to-be/> (Diakses pada 7 Oktober 2021)

² Chris Horton, “Blocked by China, Taiwan Presses to Join U.N. Agency’s Meeting,” *The New York Times*. 8 mei 2017 <https://www.nytimes.com/2017/05/08/world/asia/taiwan-world-health-china-.html> (Diakses pada 6 Oktober 2021)

³ Lally Weymouth, “Taiwanese President Tsai Ing-wen: Beijing must respect our democratic will,” *Washington Post*. July 21, 2016, https://www.washingtonpost.com/opinions/2016/07/21/44b0a1a4-4e25-11e6-a422-83ab49ed5e6a_story.html (Diakses pada 6 Oktober 2021)

⁴ Republic of Taiwan, *Taipei Representative Office Bratislava*, “ROC diplomatic allies submit proposal for WHO to invite Taiwan to WHA as an observer,” 17 Mei 2017 https://www.roc-taiwan.org/sk_en/post/1176.html (Diakses pada 6 Oktober 2021)

Taiwan dan Tiongkok masih tetap berlanjut. Taiwan tetap tak kunjung berkesempatan untuk menghadiri pertemuan WHA. Berada 130 km dari Tiongkok, pusat penyebaran Covid-19, Taiwan diprediksi akan mengalami dampak pandemi yang parah, karena terdapat lebih dari 400.000 warga Taiwan bekerja di Tiongkok, serta hampir 3 juta wisatawan asal Tiongkok mengunjungi Taiwan di tahun 2019.⁵ Namun kenyataannya Pemerintah Taiwan berhasil mengendalikan persebaran virus di wilayahnya tanpa perlu memberlakukan *lockdown* seperti banyak negara lain.⁶ Kasus positif pertama di Taiwan tercatat pada 21 Januari 2020, dan hingga bulan Januari 2021, kasus Covid-19 terkonfirmasi di Taiwan berjumlah 889 kasus dengan 7 kematian.⁷ Angka ini tergolong sangat rendah mengingat populasi Taiwan yang mencapai 23,7 juta jiwa di tahun 2020.⁸

Pandemi Covid-19 ternyata memberi kesempatan bagi Taiwan untuk meningkatkan partisipasi internasionalnya. Selain karena keberhasilannya dalam menghadapi pandemi Covid-19, pemberian bantuan kesehatan Taiwan kepada negara lain turut mendapat sorotan internasional. Pemerintah Taiwan dicap sukses dalam menangani pandemi. Meski tidak serta-merta mendapatkan pengakuan kedaulatan, tetapi hal ini dapat menjadi *soft power* yang meningkatkan citra positif Taiwan di mata internasional.

⁵ Sheng-Fang Su, Yueh-Ying Han. "How Taiwan, a non-WHO member, takes actions in response to Covid-19," *Journal of Global Health* Vol. 10, No. 1. (2020)

⁶ Kate O'flaherty, "How Taiwan beat Covid-19," *WIRED*. 14 November 2020, <https://www.wired.co.uk/article/taiwan-coronavirus-covid-response> (Diakses pada 23 Januari 2021)

⁷ Taiwan Centers for Disease Control. "Taiwan timely identifies first imported case of 2019 novel coronavirus infection returning from Wuhan, China through onboard quarantine; Central Epidemic Command Center (CECC) raises travel notice level for Wuhan, China to Level 3: Warning," *Taiwan Centers for Disease Control*. 21 Januari 2020. https://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/pVg_jRVvtHhp94C6GShRkQ?typeid=158 (Diakses pada 23 Januari 2021)

⁸ "Taiwan Population" *CEIC*, <https://www.ceicdata.com/en/indicator/taiwan/population> (Diakses pada 23 Januari 2021)

Saat pandemi Covid-19 melanda, upaya jangka panjang Taiwan dalam memperjuangkan partisipasi internasional di WHO mendapatkan dukungan baru. Meski di tahun-tahun sebelumnya pendukung upaya Taiwan untuk kembali mengikuti jalannya WHA hanya berasal dari negara sekutu diplomatik dan *like minded countries*⁹, pada tahun 2021 dukungan yang diperoleh Taiwan meningkat drastis. Setidaknya terdapat 50 negara sejauh ini yang telah mendorong WHO untuk melunakkan posisinya dalam upaya Taiwan untuk ikut serta dalam WHA, termasuk Amerika Serikat, dan negara-negara anggota G7.¹⁰ Kementerian Luar Negeri Taiwan di laman resmi menyatakan bahwa dukungan terhadap kehadiran Taiwan di WHA pada tahun ini mencapai ketinggian baru yang belum pernah terjadi sebelumnya.¹¹

Namun, tak seperti pada saat keberhasilan di masa pemerintahan Ma, WHO menyatakan bahwa direktur jenderal organisasi tersebut tidak lagi memiliki kuasa dalam mengundang Taiwan untuk menjadi pengamat di WHA karena adanya perbedaan pandangan negara-negara anggota. Oleh karena itu, direktur jenderal hanya akan menyampaikan undangan ketika jelas bahwa negara-negara anggota menyatakan dukungan.¹² Meski belum berhasil untuk kembali mengikuti jalannya

⁹ MOFA Taiwan. Public Diplomacy Coordination Council, "MOFA grateful to diplomatic allies and like-minded countries for expressing support of Taiwan's participation at WHA." 25 Mei 2018 <https://nsppe.mofa.gov.tw/nsppe/news.php?post=135019&unit=370> (Diakses pada 6 Oktober 2021)

¹⁰ Lawrence Chung. "Taiwan holds out hope of 11th-hour invitation to World Health Assembly with support of the West." *SCMP* 10 Mei 2021. <https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3132938/taiwan-holds-out-hope-11th-hour-invitation-world-health> (Diakses pada 6 Oktober 2021)

¹¹ Taiwan Republic of China, Bureau de Genève, Délégation Culturelle et Économique de Taipei. "MOFA thanks the international community for unprecedented support of Taiwan's participation in the WHA." 1 Juni 2021. https://www.roc-taiwan.org/chgva_fr/post/1815.html (Diakses pada 7 Oktober 2021)

¹² Laura Kelly. "WHO Says It Cannot Invite Taiwan to Upcoming Global Health Meeting." *The Hill*. 11 Mei 2020. <https://thehill.com/policy/international/497157-who-says-it-cannot-invite-taiwan-to-upcoming-global-health-meeting>. (Diakses pada 8 Oktober 2021)

WHA, namun peningkatan jumlah dukungan yang signifikan terhadap partisipasi Taiwan selama pandemi Covid-19 membuat isu ini menarik untuk diteliti.

1.2. Rumusan Masalah

Sejak tahun 2017, undangan untuk kembali mengikuti WHA tak kunjung didapatkan Taiwan akibat terhalang *One China Principle*. Agar dapat diundang ke rapat umum tahunan badan tertinggi WHO tersebut, suatu entitas internasional harus mendapatkan persetujuan dari mayoritas negara-negara anggota. Meski terasing dari pemerintahan kesehatan global, tak lantas membuat Taiwan terpuruk saat pandemi melanda. Pada masa awal pandemi, pemerintah Taiwan sukses mengontrol penyebaran virus di wilayahnya, serta berupaya membantu negara lain. Keberhasilan Taiwan dalam menangani pandemi Covid-19 dapat dilihat sebagai momentum bagi Taiwan untuk menggalang dukungan atas status pengamatnya di WHA. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melihat bagaimana pemanfaatan situasi pandemi Covid-19 oleh Taiwan dalam meningkatkan jumlah dukungan terhadap keikutsertaannya sebagai pengamat di WHA.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian yang ingin dijawab adalah bagaimana upaya yang dilakukan Taiwan dalam memperoleh dukungan publik untuk status pengamat di WHA pada masa pandemi Covid-19?


1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh Taiwan untuk memperoleh dukungan dalam mendapatkan status pengamat di WHA pada masa pandemi Covid-19.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam menambah wawasan mengenai isu pandemi dalam hubungan internasional. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi yang melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya seputar isu Asia Timur, khususnya Taiwan.

1.6. Studi Pustaka



Untuk membantu memahami isu lebih dalam, penulis merujuk pada beberapa literatur penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dibahas. Literatur pertama adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Yen-Fu Chen dengan judul “Taiwan and the World Health Assembly/World Health Organization: Perspectives from Health Services and Research”¹³ Artikel ini menyoroti kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat Taiwan dan potensi ancaman terhadap kesehatan internasional yang timbul dari keterasingan Taiwan di dunia internasional. Taiwan dan Tiongkok menjalankan sistem pemerintahan, hingga pelayanan kesehatan yang berbeda. Keterasingan Taiwan dari organisasi-organisasi internasional, khususnya WHO, membuat 23 juta masyarakat Taiwan ‘terlantar’.

Dari penelitian ini, penulis mengetahui dampak-dampak yang ditimbulkan akibat keterasingan Taiwan dari WHA/WHO. Keterasingan ini sebenarnya tidak terlalu berdampak negatif pada kemampuan Taiwan untuk mempromosikan kesehatan dan berinteraksi dengan komunitas internasional. Terbukti dari bagaimana selama beberapa dekade pengecualiannya dari pemerintahan

¹³ Yen-Fu Chen, “Taiwan and the World Health Assembly/World Health Organization : Perspectives from Health Services and Research,” *International Journal of Taiwan Studies* 3, no. 1 (2020): 10–27.

kesehatan global, Taiwan telah berkontribusi pada kemajuan layanan medis dan kesehatan, serta penelitian, baik lokal maupun internasional. Namun, pemerintah Taiwan kerap menghadapi kesulitan yang berkaitan dengan partisipasi dalam pertemuan internasional, dan dukungan internasional selama situasi darurat karena kurangnya saluran resmi untuk berkomunikasi secara langsung. Meski memiliki sistem pelayanan kesehatan yang baik, bukan berarti Taiwan kebal dan akan selalu sukses dalam menghadapi jenis ancaman kesehatan baru di masa mendatang.

Literatur kedua adalah artikel jurnal berjudul “Taiwan’s International Space and Its Expansion through the World Health Assembly” oleh Diana Sofia Calderón.¹⁴ Artikel ini menjelaskan keterlibatan Taiwan di WHA dan implikasinya terhadap partisipasi internasional pulau tersebut. Untuk memperluas partisipasi internasionalnya, Taiwan telah membangun identitas internasional berdasarkan fungsi, kapasitas, dan pengalaman spesifiknya yang bertujuan untuk menjadi aktor fundamental di bidang tertentu dalam dinamika internasional. Identitas ini telah berubah sepanjang sejarah.

Artikel ini melihat perubahan identitas Taiwan tersebut melalui teori fungsionalisme, bahwa peran para aktor dalam sistem internasional bergantung pada kebutuhan dasar mereka. Dari yang ingin dikenal dengan pertaniannya, kemudian sebagai entitas ekonomi yang memberi Taiwan akses ke dalam organisasi internasional seperti World Trade Organization (WTO), hingga identitas Taiwan sekarang yang ingin dikenal dalam bidang kesehatan. Melalui penelitian ini, penulis

¹⁴ Diana Sofia Calderón. “Taiwan’s international space and its expansion through the World Health Assembly,” *PORTES, Mexican Journal about the Pacific Basin* Vol.9 No.17 (2015): 123-146.

mengetahui alasan bagaimana partisipasi di WHA menjadi fokus utama kebijakan luar negeri Taiwan selama beberapa periode.

Literatur ketiga adalah artikel jurnal yang ditulis oleh A. Safril Mubah dan Sarah Anabarja, yang berjudul “From Big Data to Mask Diplomacy: Taiwan’s Effort to Strengthen International Role”¹⁵ Artikel ini membahas mengenai respons Taiwan dalam menghadapi pandemi Covid-19. Taiwan, meski bukan anggota WHO, dianggap sukses mengendalikan pandemi di wilayahnya. Ketepatan respons Taiwan ini kemudian melejitkan citra pulau tersebut di tataran internasional. Dari artikel ini, penulis mengetahui seperti apa strategi yang dilakukan Taiwan sehingga diplomasi masker yang dilakukannya berhasil.

Strategi Taiwan berawal dari kesiapan dini Taiwan yang didasari pengalaman sewaktu menghadapi wabah SARS di tahun 2003. Kemudian didukung dengan digitalisasi informasi yang menjamin akses informasi yang transparan terkait Covid-19, serta kolaborasi lintas sektor dalam melakukan diplomasi masker, menjadikan respons Taiwan dipuji internasional. Meskipun memiliki pembahasan yang serupa, penelitian yang penulis lakukan memfokuskan kajian pada kaitan ketepatan respon pandemi Taiwan, sebagai salah satu upaya yang dilakukan Taiwan untuk mendapatkan status pengamat di WHA.

Literatur keempat adalah artikel jurnal berjudul “South Korea’s Public Diplomacy During the Covid-19 Pandemic: Seeking Status as An Authority in

¹⁵ A. Safril Mubah, Sarah Anabarja, “From Big Data to Mask Diplomacy: Taiwan’s Effort to Strengthen International Role,” *Jurnal Global & Strategis* vol. 14, no. 2 (2020): 189-202.

Global Governance,”¹⁶ oleh Kadir Jun Ayhan. Artikel jurnal ini membahas mengenai diplomasi publik yang dilakukan Korea Selatan di masa pandemi Covid-19. Situasi pandemi Covid-19 diketahui telah mengkatalisasi kepentingan nasional Korea Selatan untuk meningkatkan status globalnya menjadi salah satu otoritas teratas di berbagai isu. Diplomasi publik yang dilakukan Korea Selatan di masa pandemi berhubungan dengan kerja sama dan solidaritas internasional melalui pendistribusian peralatan medis, test kit, masker, dan bantuan kemanusiaan lainnya ke negara lain. Selain itu, Korea Selatan juga terlibat sangat proaktif dalam mempromosikan keberhasilan pengelolaan pandemi, dan bantuannya kepada orang lain, serta berkomunikasi untuk kerja sama dan solidaritas internasional. Hal ini kemudian berkontribusi pada pencarian statusnya di panggung global.

Terdapat dua komponen dalam diplomasi publik Korea Selatan terkait Covid-19, yaitu memproyeksikan Korea Selatan sebagai negara yang baik yang membantu negara lain di masa krisis, serta mempromosikan penanganan manajemen pandemi Korea Selatan yang relatif berhasil. Diketahui keberhasilan negara ini dalam merespons Covid-19 domestik, serta keterlibatan aktifnya dalam kerja sama dan solidaritas internasional untuk mengatasi pandemi telah memberinya lebih banyak otoritas berbasis kemampuan dan berbasis pengalaman dalam tata kelola kesehatan global.

Literatur kelima adalah artikel jurnal Anna Kobierecka dan Michał Marcin Kobierecki yang berjudul, “Coronavirus diplomacy: Chinese medical assistance

¹⁶ Kadir Jun Ayhan, “South Korea’s Public Diplomacy during the Covid-19 Pandemic: Seeking Status as an Authority in Global Governance” *KOREA ECONOMIC INSTITUTE OF AMERICA ACADEMIC PAPER SERIES* (2022): 1–18

and its diplomatic implications.”¹⁷ Penelitian ini menyoroti pelaksanaan diplomasi kesehatan sebagai bagian dari diplomasi publik yang dilakukan oleh Tiongkok. Diketahui bahwa Tiongkok telah sejak lama berusaha untuk menciptakan citra internasional sebagai negara yang mencintai perdamaian dan siap untuk kerjasama internasional. Pandemi Covid-19 memberinya kesempatan untuk mengungkapkan pesan-pesan itu dengan cara yang lebih eksplisit, melalui pemberian bantuan. Secara khusus, apa yang dilakukan oleh Tiongkok dalam artikel ini disebut sebagai *coronavirus diplomacy*, yang pada prinsipnya ditempuh melalui dua jalur. Pertama, Tiongkok menggarisbawahi keberhasilannya dalam memerangi penyakit, yang pada saat yang sama memberikan waktu yang berharga bagi seluruh dunia untuk mempersiapkan diri. Saluran kedua mencakup bantuan ke negara lain melalui pengiriman peralatan medis, berbagi pengetahuan, dan mengirimkan tim medis.

Dengan menunjukkan seberapa efektifnya dalam memerangi wabah domestik, dan dengan memberikan bantuan yang sangat dibutuhkan, ketika pada saat yang sama AS tidak banyak membantu sekutunya dan kemudian menjadi pusat pandemi itu sendiri, dapat menggambarkan posisi Tiongkok sebagai *global leader* mengungguli AS. Tujuan pelaksanaan *coronavirus diplomacy* yang disorot dalam penelitian ini serupa dengan pemanfaatan momentum pandemi oleh Taiwan untuk mendapatkan dukungan atas status pengamat di WHA.

Beberapa penelitian terdahulu tampak menunjukkan bahwa negara nyatanya memanfaatkan situasi pandemi untuk memajukan kepentingan nasionalnya. Diplomasi publik yang dilakukan selama pandemi Covid-19

¹⁷ Kobierecka, A., & Kobierecki, M. M. (2021). Coronavirus diplomacy: Chinese medical assistance and its diplomatic implications. *International Politics (The Hague)*, 58(6), 937–954.

mencakup pemberian bantuan kesehatan, dan berbagai inisiatif terkait kesehatan lainnya. Narasi diplomasi publik yang dilakukan di masa pandemi tak jauh jauh dari keberhasilan suatu negara dalam menangani pandemi, serta kerelaan negara tersebut dalam membantu negara lain. Menunjukkan komitmen terhadap isu kesehatan terbukti memberikan citra positif bagi negara yang melakukannya.

1.7. Kerangka Konseptual

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, penulis menggunakan konsep berikut:

1.7.1. Diplomasi Publik

Istilah ‘diplomasi publik’ dipahami oleh Signitzer dan Coombs sebagai suatu cara di mana pemerintah dan individu serta kelompok swasta dapat secara langsung atau tidak langsung memengaruhi opini dan posisi publik tersebut, yang secara langsung memengaruhi keputusan politik luar negeri pemerintah lain.¹⁸ Serupa dengan pengertian tersebut, Manheim mendefinisikan diplomasi publik sebagai kegiatan diplomasi *government to people*, yang mencakup upaya pemerintah untuk mempengaruhi opini publik, elit, serta kebijakan luar negeri negara sasaran.¹⁹ Diplomasi publik secara tradisional ditujukan pada khalayak asing, membentuk persepsi mereka dan akibatnya meningkatkan *soft power* suatu negara di luar negeri. *Soft power* sendiri dapat dijelaskan sebagai “*The ability to get what do you want through the attraction rather than through coercion or payment,*”

¹⁸ Benno H. Signitzer and Timothy Coombs, “Public Relations and Public Diplomacy: Conceptual Covergences,” *Public Relations Review* 18, no. 2 (1992): 137–147.

¹⁹ Jarol B. Manheim, *Strategic Public Diplomacy and American Foreign Policy: The Evolution of Influence* (New York: Oxford University Press, 1994).

melalui soft power pihak asing akan melakukan hal yang kita inginkan tanpa diminta dan dipaksa. Hal ini, kemudian menjadi faktor yang mendorong negara berlomba-lomba dalam melakukan diplomasi publik yang dapat menarik perhatian publik asing agar mempermudah pencapaian kepentingan negaranya.

Diplomasi publik dapat digunakan untuk mempromosikan nilai-nilai yang dapat meningkatkan stabilitas negara; menciptakan rasa saling pengertian untuk mencegah atau bahkan memperbaiki kesalahpahaman antar negara; membangun reputasi dan citra positif negara, sehingga praktik diplomasi publik juga dapat digunakan dalam kondisi yang tidak biasa, seperti pada masa krisis. Arjen Boin dan Paul 't Hart mendefinisikan kondisi krisis sebagai saat ketika individu, kelompok, organisasi, daerah (baik kota maupun negara) merasakan ancaman mendesak mengenai nilai-nilai inti dan harus segera diselesaikan dengan berbagai cara, seperti mengadakan pertemuan antar negara yang diharapkan menghasilkan solusi, baik berupa kesepakatan, pedoman penawaran tindakan yang dapat dilakukan oleh pelaku terkait, maupun kesepakatan yang telah disepakati bersama. Salah satu aspek penting dari krisis menurut Boin dan Hart ini adalah bahwa aktor dipicu untuk segera bertindak sebagai respons terhadap peristiwa di dunia di sekitar mereka.

Dalam keadaan krisis, diplomasi publik dapat digunakan sebagai instrumen manajemen krisis untuk mencegah dan meringankan krisis yang sedang berlangsung. Menurut Eva-Karin Olsson, manajemen krisis melalui diplomasi publik dapat dilakukan melalui²⁰:

²⁰ Eva-Karin Olsson, "Public Diplomacy as a Crisis Communication Tool", *Journal of International Communication*, Vol. 19 (2013): 219-234

1. *Sense Making*

Pendekatan yang digunakan untuk menginterpretasikan lingkungan, khususnya lingkungan yang berubah, dan memotivasi tindakan di masa depan dikenal sebagai *sense making*. Di masa krisis, penting untuk memahami krisis yang terjadi, beserta resiko yang kemungkinan akan dihadapi untuk menentukan respons atau tindakan yang akan diambil.

2. *Networking*

Krisis biasanya mengharuskan aktor untuk terlibat dan berinteraksi dengan mitra yang sebelumnya tidak dikenal atau sama sekali tidak dikenal. Diplomasi publik memungkinkan terbentuknya suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan antara aktor negara dan atau aktor non-negara di masa krisis. Jaringan komunikasi dan kemitraan tersebut nantinya dapat digunakan untuk membantu pemerintah menghadapi krisis. Membangun kemitraan atau *networking* di masa krisis juga dapat memberikan saluran dan legitimasi yang dibutuhkan untuk mengkomunikasikan pesan secara efektif.

3. *Crafting Message and Communication*

Kemitraan tidak akan terbentuk tanpa adanya penyampaian informasi yang tepat. Oleh karena itu, pemerintah perlu menentukan strategi komunikasi yang tepat ketika berhadapan dengan pemangku kepentingan yang berbeda. Agar kemitraan dan komunikasi bisa mendukung pencapaian tujuan bersama, pesan perlu dirumuskan dengan cara yang sesuai dengan norma dan nilai pemangku kepentingan.

Selain mampu meminimalisir dampak krisis yang dialami, diplomasi publik di masa pandemi apabila dilakukan secara tepat juga mampu menciptakan citra positif. Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 merupakan krisis kesehatan global yang menuntut aktor-aktor baik dalam negeri maupun internasional untuk bertindak cepat menangani krisis secara efektif. Meningkatnya dukungan terhadap Taiwan untuk menjadi pengamat di WHA diketahui tidak terlepas dari diplomasi publik yang dilakukannya semasa pandemi Covid-19. Dengan demikian, konsep diplomasi publik yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini dapat membantu penulis untuk menjawab pertanyaan penelitian.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif khususnya berkaitan dengan pengumpulan dan interpretasi data non-numerik untuk tujuan memahami lingkungan manusia dan sosial. Metode penelitian kualitatif mencari hubungan sebab-akibat dari suatu kasus, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Taiwan melakukan upaya-upaya yang dapat dikategorikan sebagai diplomasi publik, untuk meningkatkan jumlah dukungan akan keikutsertaan Taiwan dalam WHA. Penelitian deskriptif digunakan oleh penulis untuk mendeskripsikan bagaimana diplomasi publik yang dilakukan Taiwan dalam memperoleh dukungan atas status pengamat di WHA.

1.8.2. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan memfokuskan bahasan pada diplomasi publik yang dilakukan Taiwan untuk memperoleh dukungan terhadap status

pengamat di WHA. Batasan waktu penelitian ini adalah tahun 2019 hingga 2021. Tahun 2019 dipilih karena melihat sikap responsif Taiwan saat virus Covid-19 pertama kali mulai menyebar dan menjadi momentum unik bagi Taiwan untuk memperoleh dukungan. Kemudian 2021 dipilih sebagai batas akhir penelitian karena pada tahun ini, terjadi peningkatan dukungan terhadap upaya Taiwan untuk menghadiri WHA sebagai pengamat.

1.8.3. Unit dan Tingkat Analisis

Dalam penelitian ini, yang menjadi unit analisis adalah Taiwan terkait upayanya dalam memperoleh dukungan untuk status pengamat di WHA. Unit eksplanasinya adalah kepentingan nasional Taiwan, mencakup partisipasi internasional, dan ancaman yang dialami oleh Taiwan akibat tidak tergabung dalam WHO. Level analisa penelitian ini berada pada tingkat negara.

1.8.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa studi pustaka (*library research*) dengan mengolah data-data sekunder yang berasal dari berbagai literatur seperti buku, artikel jurnal ilmiah, berita media massa, situs resmi dari pemerintahan, maupun tesis yang relevan dengan bahasan penelitian mengenai diplomasi publik, *soft power*, partisipasi Taiwan dalam WHA, serta permasalahan terkait status Taiwan di WHO. Kemudian penulis juga untuk mengumpulkan bukti-bukti yang mengarah pada upaya Taiwan dalam memperoleh dukungan terhadap status pengamat di WHA. Untuk mempermudah pencarian data, penulis menggunakan kata kunci seperti Taiwan, diplomasi publik, negosiasi kesehatan, *Soft Power*, WHO, status pengamat, dan WHA.

1.8.5. Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman mengemukakan teknik analisis data secara induktif yang meliputi reduksi data, *display data*, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Data-data yang didapatkan perlu direduksi, dirangkum, difokuskan kepada hal-hal penting, sehingga lebih mudah untuk dianalisis. Reduksi data sangat diperlukan, khususnya untuk data-data primer, karena terkadang bisa saja terjadi perluasan pembahasan. Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan cara mereduksi data menjadi kata kunci yang relevan seperti diplomasi kesehatan Taiwan, negosiasi kesehatan, *soft power*, *One China Principle*, pengamat WHA, serta pandemi Covid-19.

Langkah selanjutnya, data-data yang telah direduksi diolah ke dalam bentuk tulisan dengan alur yang jelas. Melalui data yang disajikan, peneliti akan memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut. Pada tahap *display data* ini, penulis mengaitkan data-data yang telah direduksi dengan kerangka konsep yang ada untuk melihat upaya-upaya yang dilakukan Taiwan sehingga dukungan terhadap status pengamat di WHA meningkat.

Tahap terakhir adalah mengambil kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan yang ditarik menjurus pada jawaban dari pertanyaan penelitian yang telah diajukan. Di tahap ini, peneliti melakukan

penarikan kesimpulan dan verifikasi atas upaya-upaya diplomasi kesehatan yang dilakukan Taiwan yang berdampak pada meningkatnya dukungan terhadap keikutsertaan Taiwan dalam WHA.

1.9. Sistematika Penulisan

Berikut adalah sistematika penulisan penelitian ini:

BAB I: Pendahuluan

Merupakan pendahuluan yang berisi rancangan riset yang melandasi penelitian ini. Bab ini terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi kepustakaan, kerangka konseptual, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Ruang Internasional Bagi Taiwan

Pembahasan dalam bab ini terdiri atas subbab yang menjelaskan mengenai kondisi politik Taiwan yang berdampak pada keterasingannya dari berbagai organisasi internasional, kemudian dampak dari keterasingan tersebut. Subbab selanjutnya memaparkan tentang ruang internasional bagi Taiwan.

BAB III: Dinamika Partisipasi Internasional Taiwan dalam World Health Assembly

Bab ini menjelaskan dinamika perjalanan pencarian status pengamat Taiwan di WHA. Pembahasan dalam bab ini meliputi gambaran umum WHO, penjelasan mengenai status pengamat, motivasi Taiwan dalam mengejar status pengamat tersebut, tantangan yang dialami, kemudian upaya-upaya terdahulu dalam konteks diplomasi publik yang dilakukan oleh Taiwan dalam mendapatkan status pengamat di WHA.

BAB IV: Upaya Taiwan Mendapatkan Status Pengamat Dalam World Health Assembly di Masa Pandemi Covid-19

Bab ini berisi analisis dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan mengenai upaya yang dilakukan Taiwan dalam mendapatkan dukungan dari negara-negara lain untuk memperoleh status pengamat di WHA pada masa pandemi Covid-19. Analisis dalam bab ini akan dideskripsikan melalui kerangka konseptual diplomasi publik yang telah dijelaskan sebelumnya.

BAB V: Penutup

Bab ini berisi kesimpulan penelitian serta saran-saran penelitian lebih lanjut mengenai upaya Taiwan dalam mendapatkan status pengamat di WHA.

